

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PADA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang)**

Amelia Ika Pratiwi
m3lly_16@yahoo.co.id
STIE ASIA Malang

Rike Lulut Dwi Ardilatri
kekeardilatri@gmail.com
STIE ASIA Malang

Abstrak: Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyajikan informasi-informasi penting tentang tata cara penulisan dan penyajian suatu laporan keuangan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyajian laporan keuangan pada suana kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sesuai dengan standart yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitataif dengan jenis data kualitatatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi terbuka, wawancara dan teknik kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013 Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dan tepat waktu.

Kata Kunci: PP No 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan, SKPD

Abstract: *The Government Regulation No. 71 in 2010 has explained about the important information of how to write financial statement and how to present this statement in proper way. The objective of research is to understand and to analyze the presentation of financial statement made by Local Officer Work Unit (SKPD) of Bina Marga Official for Malang District based on the prevailed standard. Research type is quantitative descriptive. Data type includes qualitative and quantitative. Data source involves primary and secondary data. Data collection techniques are open observation, interview and literature study. Result of research has indicated that in 2013, Bina Marga Official for Malang District has presented financial statement in pursuance of Government Regulation No. 71 of 2010 and prepared it on time.*

Keywords: *Government Regulation No. 71 of 2010, Financial Statement, SKPD*

Tiga tujuan dalam mempelajari akuntansi yang pertama untuk memahami standar akuntansi yang berkembang saat ini, kedua mempelajari kelemahan dan kelebihan dari standar akuntansi yang ada saat ini dan ketiga untuk memperbaiki standart akuntansi di masa yang akan datang. Perkembangan akuntansi sektor publik saat ini sebagai upaya untuk memperbaiki standar akuntansi yang berlaku saat ini. Hal ini terkait dengan upaya untuk peningkatan kualitas dari laporan keuangan sektor

publik, yaitu laporan yang menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik.

Menghasilkan suatu laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, Pemerintah Daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Selain sistem akuntansi yang handal, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan setiap transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi oleh pihak yang terkait dengan menggunakan sistem pencatatan dan standar akuntansi yang berlaku. Penerapan standar akuntansi yang berlaku merupakan salah satu asumsi dasar yang penting dalam akuntansi, dikarenakan standar akuntansi menentukan suatu pencatatan dan penyusunan suatu laporan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya suatu sistem manajemen keuangan yang baik merupakan salah satu wujud dari *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen yang sesuai dengan asas demokrasi, menghindari kesalahan alokasi pendanaan investasi dan pencegahan korupsi. Bentuk perwujudan manajemen pemerintahan yang baik memerlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. Hal ini diperlukan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan sebagai dasar dari pengambilan keputusan serta bentuk dari evaluasi kinerja suatu organisasi. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang penting dalam menyajikan laporan keuangan yang baik sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik yang berpengaruh langsung pada pengambilan keputusan dan menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut membuat laporan keuangan yang eksternal (Mardiasmo 160:2010).

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang merupakan salah satu organisasi sektor publik yang menyajikandan membuat laporan keuangan eksternal yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Kinerja. Beberapa kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dalam menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2013 menggunakan ketentuan dan prinsip akuntansi yang diterima umum. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomer 21 Tahun 2011 dan berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomer 40 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malang. Standar dan kebijakan akuntansi Pemerintahan yang digunakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013 dengan tujuan menyajikan laporan keuangan yang handal dan pengambilan keputusan untuk periode yang akan datang.

Penelitian yang terkait dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pernah diteliti, diantaranya Nugraheni dan Subaweh (2008) yang menemukan bukti empiris bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap pengetahuan pengelola dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Hartina (2009) mengemukakan bahwa pada Pemerintahan Kabupaten Langkat Tahun 2006 telah berpedoman terhadap standar akuntansi yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa keberhasilan dalam menyajikan laporan keuangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan beberapa perangkat pendukung lainnya.

Herdillah (2009) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa laporan operasional pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan menghasilkan pelaporan terhadap suatu entitas dilaporkan secara transparan. Penelitian Lasoma (2012) mengemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini juga dikemukakan oleh penelitian Adi dan Suhardjo (2013) yang mengemukakan bahwa Standart Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan pada SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Malang karena dianggap cukup untuk mewakili kriteria yang dipilih. Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2013”. Berdasarkan judul tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?
2. Apa saja cara yang diperlukan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

METODE

Lokasi yang digunakan oleh peneliti bertempat di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Jalan KH. Agus Salim No 7 Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Iskandar dalam Musfiqon, (2012:61)

Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian untuk memberikan uraian mengenai gejala, fenomena, atau fakta yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel mandiri tanpa bermaksud menghubungkan atau membandingkan. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dokumen/arsip berupa gambaran umum dinas pemerintahan, struktur organisasi dan laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013.

Penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang non angka, yaitu berupa kata, kalimat, pernyataan dan dokumen. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang dikuantitatifkan dalam paparannya (Musfiqon, 2012:153)

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari bagian keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dan data sekunder, yang merupakan data yang telah dikumpulkan lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013.

Metode dan pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan Teknik observasi terbuka, Teknik wawancara dan Teknik kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode membandingkan. Peneliti membandingkan Laporan Keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2014 dengan Peraturan Standar Akuntansi No 71 tahun 2010.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan semantik antar masalah penelitian (Musfiqon, 2012:153) . Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu :

1. Mengambil data laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013.
2. Menganalisis data laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013 yang didapatkan langsung dari Kepala Bendahara dan Keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan NO 71 Tahun 2010.

Variabel dalam penelitian menggunakan 3 variabel yaitu neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja. Uji validitas dalam penelitian di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2013 dengan menggunakan uji kredibilitas. Adapun uji kredibilitas yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahap dibawah ini :

- 1) Perpanjangan Pengamatan
- 2) Meningkatkan Ketekunan
- 3) Triangulasi
- 4) Analisis Kasus

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013

Laporan Keuangan merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban Dinas Bina Marga Kabupaten Malang atas pengelolaan keuangan daerah. Perwujudan manajemen yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat sebagai pemegang kekuasaan di daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pembuatan laporan keuangan pada Dinas Bina Marga memiliki landasan hukum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010.

a. PSAP NO 01 Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan dari pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan dalam PP NO 71 Tahun 2010 disusun dengan menerapkan basis akrual dan disajikan sekurang-kurangnya satu dalam satu tahun.

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini dan dikombinasi dengan landasan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan disajikan satu dalam satu tahun. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Pelaporan keuangan Dinas Bina Marga memberikan berbagai informasi tentang sumber daya ekonomi selama periode berjalan untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam kegiatan di Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

- 2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang, sedangkan Dinas Bina Marga merupakan entitas akuntansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

Penyajian laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang disajikan semua informasi-informasi penting mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selama satu periode berjalan. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (*cash basis*) dengan metode penilaian atas dasar akrual (*accrual basis*). Laporan keuangan disajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan di Dinas Bina Marga dan sumber ekonomis yang dipercaya serta menunjukkan ketataan terhadap peraturan yang berlaku.

Basis akuntansi yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan pada Dinas Bina Marga menggunakan basis akrual dan basis kas. Basis akrual menurut PSAP 01 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Basis kas menurut PSAP 01 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran.

Komponen-komponen laporan keuangan yang terdapat dalam satu set laporan keuangan menurut PSAP 01 terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali :

- a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/ daerah dan/ atau sebagai kuasa bendahara umum/ negara.

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dalam menyajikan laporan keuangan telah memenuhi komponen-komponen diatas, terdapat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak dibuat oleh Dinas Bina Marga dikarenakan Dinas Bina Marga merupakan entitas akuntansi.

Struktur dan isi pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah sesuai dengan isi PSAP 01.

- a) Identifikasi penyajian laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupten Malang dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap laporan untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan seperti nama entitas, tanggal pelaporan, dan mata uang pelaporan.
- b) Periode pelaporan pada Dinas Bina Marga Kabupeten Malang disajikan tepat waktu yaitu sekali dalam 1 tahun.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh langsung dari Dinas Bina Marga Kabupaten Malang baik dari observasi langsung dan hasil wawancara dapat disimpulkan Penyajian Laporan Keuangan di Dinas Bina Marga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 yang dikombinasi dengan peraturan lainnya tentang pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2010.

b. PSAP NO 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus / defisit laporan realisasi anggaran dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketataan entitas pelaporan terhadap suatu anggaran.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menggunakan anggaran bebrbasis kas. Hal ini telah sesuai dengan ruang lingkup PSAP 02 dimana transaksi diakui pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang menyajikan pendaptan-LRA, belanja, surplus / defisit-LRA dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) hal ini dapat dilihat pada lampiran 2 dan 3. Identifikasi laporan realisasi anggaran pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah jelas, terdapat nama entitas pelaporan, periode, mata uang pelaporan dan satuan angka yang digunakan. Laporan realisasi anggaran disajikan tepat waktu yaitu 1 dalam setahun. Laporan realisai anggaran pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah mencakup Pendapatan-LRA, Belanja dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran.

Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Bina Marga menyajikan klasifikasi pendapatata menurut jenis pendapatan-LRA dalam laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Akuntansi pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening kas dan diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. Akuntansi belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas dan diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pendapatan dikelompokkan menjadi dua pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Belanja dikelompokkan menjadi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, belanja modal yang terdiri dari belanja peralatan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada Tahun 2013 telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan telah mengacu pada Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai PP No 71 Tahun 2010 meskipun tidak sepenuhnya. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Bina Marga Kabupaten Malang telah diaudit dan dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut.

c. PSAP NO 03 Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tidak menyajikan Laporan Arus Kas. Hal ini dikarenakan Dinas Bina Marga merupakan entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Malang sedangkan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang merupakan entitas akuntansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

d. PSAP NO 04 Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar

laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013 telah menyajikan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan yang berpedoman pada PP No 71 Tahun 2010 menyajikan laporan entitas secara umum. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Bina Marga menyajikan perincian-perincian pos-pos laporan keuangan dan telah disajikan secara sistematis. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang meliputi penjelasan-penjelasan atau daftar terperinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam bentuk Neraca, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Malang Dinas Bina Marga. Termasuk didalamnya dijelaskan tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD, hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting serta penjelasan atas informasi non keuangan SKPD.

2. Cara-cara yang diperlukan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dalam Menyajikan Laporan Keuangan

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, setiap organisasi sektor publik diharuskan menerapkannya di dalam penyajian laporan keuangan. Dinas Bina Marga Kabupaten Malang merupakan salah satu organisasi sektor publik, dalam penyajian laporan keuangan strategi-strategi diperlukan demi mewujudkan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Berikut ini beberapa strategi yang digunakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang untuk mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik :

a. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan dari Pimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik. Pimpinan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selalu memberikan dukungan terhadap staf-staf untuk mempelajari sistem yang baru.

b. Mengikuti Pelatihan dan Workshop

Dikeluarkannya peraturan pemerintah yang baru Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai salah satu SKPD harus mengikuti peraturan yang berlaku saat ini. Sebagai salah satu SKPD Dinas Bina Marga selalu mengikuti pelatihan dan workshop baik pelatihan di daerah maupun di pusat. Hal ini dilakukan untuk perwujudan pertanggungjawaban Dinas Bina Marga Kabupaten Malang terhadap masyarakat untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan berkualitas.

c. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Keberhasilan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik didukung oleh sumber manusia yang kompeten. Berikut data pegawai Dinas Bina Marga Tahun 2013.

Tabel 1.
Data Kepegawaian Dinas Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2013

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Strata Dua (S2)	8
2	Pendidikan Strata Satu (S1)	38
3	Pendidikan D3/Sarjana Muda	5
4	Pendidikan SMA	105
5	Pendidikan SMP	55
6	Pendidikan SD	51
	Jumlah Total	262

Penyajian pelaporan keuangan Dinas Bina Marga dalam pembuatan laporan keuangan dilakukan secara internal yang langsung diawasi BPK dan Inspektorat Jendral Keuangan, hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berada di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang memiliki kemampuan yang baik dan kompetent.

d. Komputer yang Mendukung Aplikasi-Aplikasi

Keberhasilan dalam menyajikan pelaporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang juga didukung oleh komputer yang memadai dan mendukung aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa laporan keuangan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2013 telah diperiksa oleh BPK dan Inspektorat Jendral Keuangan. Pada tahun anggaran 2013. Laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun anggaran 2013 telah disajikan tepat waktu dan disahkan pada tahun berakhir 31 Desember 2014 hal ini sesuai dengan peraturan SAP yang berlaku saat ini. Penyusunan laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2013 tidak sepenuhnya berpedoman pada PP No 71 Tahun 2010 dalam penyusunannya juga menggunakan beberapa Peraturan Daerah dan Kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Penyajian laporan keuangan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang tidak menyajikan laporan arus kas hal ini dikarenakan Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagai entitas akuntansi yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Dinas Bina Marga Kabupaten Malang dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2013 tidak menggunakan bantuan tenaga konsultan semuanya dilakukan oleh pihak internal hal ini dikarenakan pegawai Dinas Bina Marga Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang kompetent yang selalu mengikuti pelatihan dan workshop serta didukung oleh adanya komputer dan aplikasi komputer yang memadai.

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2013 kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang bisa dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari penyajian

laporan keuangannya yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang berlaku pada saat ini dan terdapat pembagian tugas secara jelas sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Herdillah, Heni. 2014. *Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Daerah*, (online), (<http://milamashuri.wordpress.com>), diaskes tanggal 16 Maret 2014.
- Lasoma, Vicky Agustiawan. *Pengaruh Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Mardiasomo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Musfiqon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Nordiawan dan Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugraheni, Purwanti dan Subaweh, Imam. *Pengaruh Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Gunadarma.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. *Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan*.
- Silka, Hartina. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerinthan Kabupaten Langkat*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____, 2010. *Modul Akuntansi Sektor Publik*.
- _____, 2013. *Tupoksi Dinas Bina Marga Kabupaten Malang*, (online), <http://binamarga.malangkab.go.id/konten-15.html>, diaskes tanggal 02 April 2013.